

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, S., & Suripto. (2017). *Indonesia Bebas Pasung 2017 : Pemodelan Inovasi Pemerintah Daerah Menuju Bebas Pasung*.
- Alviya, I., Suryandari, E. Y., Maryani, R., & Muttaqin, M. Z. (2016). Meningkatkan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Wilayah Hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 13(2), 121–134.
- Arfandi, Z., Susilo, E., Widodo, G. G., Program, M., Ilmu, S., Stikes, K., ... Waluyo, N. (2014). *Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Kemampuan Perawatan Diri pada Anak Retardasi Mental di SLB Negeri Ungaran*.
- Badan Peneliti dan Pengembangan Kesehatan. (2018). *Hasil Utama RISKESDAS 2018*.
- Bina Kesehatan Jiwa. (2017). *Indonesia Bebas Pasung ; Pencapaian Program*. Retrieved from <http://sehat-jiwa.kemkes.go.id/detailinfokesehatan/28>
- Buse, Mays, Walt. (2005). *Making Health Policy : Understanding Public Health*. Open University Press, Maidenhead.
- Daulima, N. H. C. (2014). *Proses Pengambilan Keputusan Tindakan Pasung oleh Keluarga Terhadap Klien Gangguan Jiwa*. Thesis. Universitas Indonesia.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. (2018). *Profil Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2018*.
- Hinshaw, S. P. (2005). The Stigmatization of Mental Illness in Children and Parents : Developmental Issues , Family Concerns and Research Needs. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 7(46), 714–734.
- Human Right Wacth. (2018). *Indonesia : Pasung Sudah Berkurang, Namun Tetap Ada*.

- Idaiani, S., & Raflizar, R. (2015). Faktor yang Paling Dominan terhadap Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 18(1), 11–17.
- Iqbal, M. (2007). Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(3), 89–99.
- Irham. (2009). Peran Stakeholder terhadap Program Sanitasi Lingkungan dalam Penanggulangan Demam Berdarah Dengue : Studi Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Thesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2002). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220 Tahun 2002*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2010). *Menuju Indonesia Bebas Pasung*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Undang - Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Kementerian Kesehatan*.
- Komar, S. (2010). Peran Stakeholder pada Pelaksanaan Kegiatan Desa Siaga dalam Penanggulangan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. *Thesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Kumalasari, I., & Dewi, U. (2017). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kasus Gangguan Jiwa Di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Adinegara.*, 6(5), 469–476.

- Laila, N. H., Mahkota, R., Krianto, T., & Shivalli, S. (2018). Perceptions about pasung (physical restraint and confinement) of schizophrenia patients: A qualitative study among family members and other key stakeholders in Bogor Regency, West Java Province, Indonesia 2017. *International Journal of Mental Health Systems*, 12(1), 1–7.
- Lestari, W., & Wardhani, Y. F. (2014). Stigma and Management on People with Severe Mental Disorders with “ Pasung ” ( Physical Restraint ). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 17(2 April 2014), 157–166.
- Media Indonesia. (2017). Indonesia Bebas Pasung 2017. Retrieved from [http://www.dinkesjatengprov.go.id/dokumen/manajemen\\_informasi](http://www.dinkesjatengprov.go.id/dokumen/manajemen_informasi)
- Minas, H., & Diatri, H. (2008). Pasung: Physical restraint and confinement of the mentally ill in the community. *International Journal of Mental Health Systems*, 2.
- Mitsel. (2015). Peran Stakeholder Kunci dalam Kebijakan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS Studi Kasus di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. *Thesis*. Universitas Gadjah Mada.
- Nugroho, H. C., & Zauhar, S. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *J-PAL*, 5(1), 12–22.
- Patel, V., & Bhui, K. (2018). Unchaining people with mental disorders: Medication is not the solution. *British Journal of Psychiatry*, 212(1), 6–8.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2014). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan*.
- Puteh, I., Marthoenis, M., & Minas, H. (2011). Aceh Free Pasung: Releasing the mentally ill from physical restraint. *International Journal of Mental Health Systems*, 5(1), 10.

- Putra, F. Y. (2016). Strategi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pemahaman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Puskesmas Mangkurawang. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 74–87.
- Sim, R., & Rust, G. (2013). Primary Care , Behavioral Health , and Public Health : Partners in Reducing Mental Health Stigma. *American Journal of Public Health*, 103(5), 774–776.
- Suharto, B. (2014). Budaya Pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis (Studi Tentang Upaya Pelepasan Pasung dan Pencegahan Tindakan Pemasungan di Kabupaten Wonogiri). *Indonesian Journal on Medical Science*, 1(1), 1–3.
- Trisnantoro, L., & Hasanbasri, M. (2007). *Pelaku Politik, Stakeholders Desentralisasi dan Skenario Masa Depan*. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM.
- World Health Organization. (2013). Mental Health Action Plan 2013-2020. *WHO Library Cataloguing-in-Publication Data* Library Cataloguing-in-Publication Data, 1–44.
- World Health Organization. (2017). Depression and Other Common Mental Disorders : Global Health Estimates. *WHO Library Cataloguing-in-Publication Data* Library.
- Yanasari, P. (2017). Implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Pasung Bagi ODGJ. *Thesis*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Yuningsih, R. (2014). Analisis Segitiga Kebijakan Kesehatan dalam Pembentukan Undang - Undang Tenaga Kesehatan. *Aspirasi*, 5(2), 93–106.